

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024



Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Seruyan

Dinas Komunikasi,
Informatika,
Statistik Dan
Persandian

KATA PENGANTAR

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan. Penyusunannya merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang dicapai atas penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan penggunaan anggaran serta pelaksanaan rencana kerja tahunan yang telah dilaksanakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan tahun 2024 dapat dimanfaatkan untuk tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan serta sanksi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan.



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian

Dr. RESON RUSDIANTO, M.A.P.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770222 200604 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Dasar Hukum	4
BAB II SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN IKU	8
BAB III IKU ESELON II	12
3.1 Cascading	12
3.2 IKU Eselon II	15
3.3 Pohon Kinerja	19
BAB IV PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan merupakan suatu unit kerja yang dipercaya sebagai pengelola, pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan persandian. Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan akan selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di bidang Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan persandian sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi kebutuhan Pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legilemate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai batasan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan pada Visi dan Misi Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan.

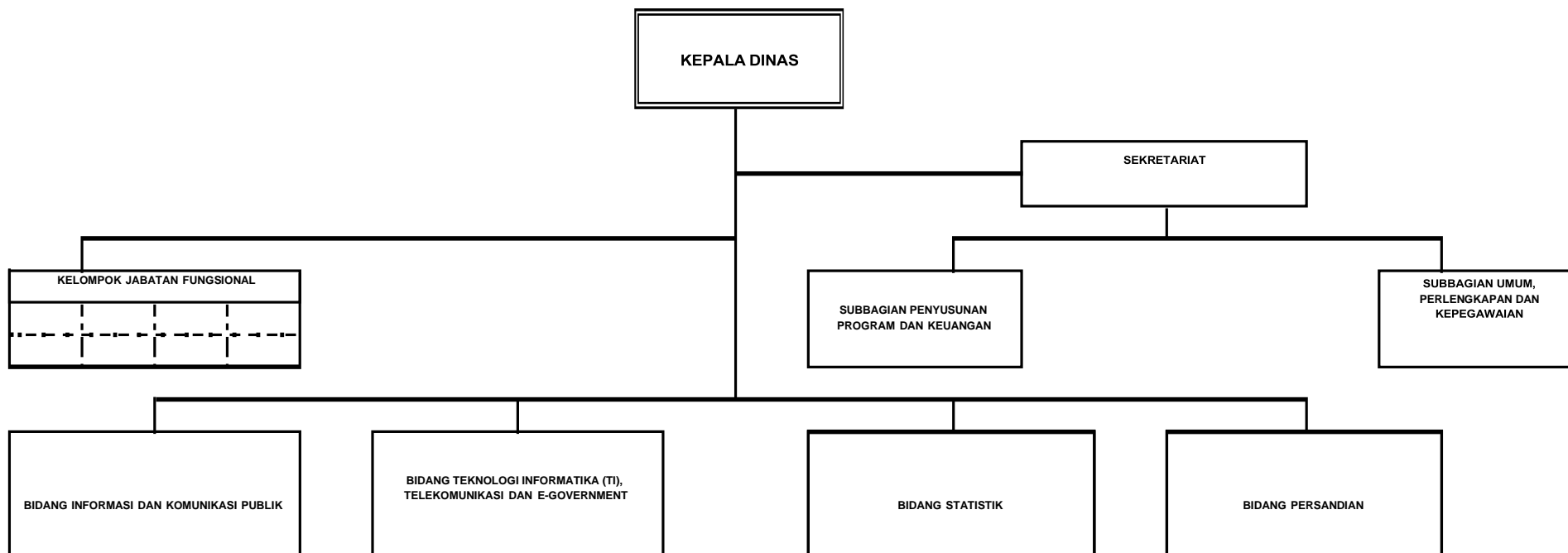
1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan meliputi : 1 (Satu) orang Kepala Dinas (Eselon IIa), 1 (Satu) orang Sekretaris (Eselon IIIa), 4 (Empat) Kepala Bidang (Eselon IIIb) dan 2 (Dua) Kepala Subbag (Eselon IVa) serta 5 (Lima) Jabatan Fungsional (Eselon IVa).

Bagan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat.
 1. Kasubbag Umum, Pelengkapan dan Kepegawaian
 2. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
 3. Perencana Ahli Muda
- c. Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik
 1. Pranata Humas Ahli Muda
- d. Bidang Pengelola Teknik Informatika dan E-Government
 1. Pranata Komputer Ahli Muda
 2. Pranata Komputer Ahli Muda
- e. Bidang Statistik
 - 1 Statistik Ahli Muda
- f. Bidang Persandiann

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023



1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan 2024 - 2026 I-5 Bab I Pendahuluan 7. 8. 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

Sistematika Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 045.34/ / DKISP-I/ / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2024-
2026

DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor... . Tahun 20.... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 20.... Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Seruyan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Seruyan dalam :
1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 2. Menetapkan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 3. Menyusun Dokumen Perjanjian kinerja;
 4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Seruyan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Seruyan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
pada Tanggal : Januari 2024



Kepala Dinas,

dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. SERUYAN
TA.2024-2026

No.	Tujuan	IKU Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
-1	-2	-3	-4	-5	2024	2025	2026	-7				-8	-9	-10		-12	-13	-14
1.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	85%	90%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA									-	
2.	Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknoogi informasi	Indeks SPBE	Meningkatnya pemanfaatan IT pada penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	50%	55%	60%	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Persentase Program Informasi dan komunikasi Publik	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	43%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	18 Media	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik.	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik.	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
										Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	53 Kelompok		Jumlah Surat Kabar Nasional		11 Jenis	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
													Jumlah Surat Kabar Lokal		11 Jenis			
																Monitoring Informasi dan Penetapan agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
																pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Terlaksananya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
																penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Terlaksananya penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
																Pengelolaan media komunikasi publik	Terlaksananya Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
																Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Jenis pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
																Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Layanan Hubungan Media	jumlah layanan hubungan media
																kemitraan dengan pemangku kepentingan	Terlaksananya kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Pemangku Kepentingan Mitra Pemda
																penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Terlaksananya penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang di tingkatkan Kapasitasnya
																Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Terlaksananya Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan

																Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.			Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20%	50%	65%	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Persentase Program Aplikasi Informatika	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	60%	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Sub Domain yang Dikelola	1 Domain	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kupaten/Kota	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
																Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Nama Domaian dan Sub Domaian dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Kota	jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
																Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.	Terlaksananya Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
												Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Kegiatan	penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah
																sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik	Terlaksananya sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
																pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Terlaksananya pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
																penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Terlaksananya jumlah Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
																Kordinasi dan singkronisasi sistem keamanan informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Sistem Keamanan informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
																koordinasi dan singkronisasi data dan informasi elektronik	Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi data dan informasi elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
																Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Terlaksananya Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan

																penyelenggaraan sistem penghubungan layanan pemerintah	Terlaksananya penyelenggaraan sistem penghubungan layanan pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
																pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City
																Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
4.			Terwujudnya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi	Nilai Indeks Data Statistik Sektoral yang disajikan	100%	100%	100%	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Persentase Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terselenggara	100%	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
										Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada					Peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu ststistik daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu ststistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
																Membangun metadata statistik sektoral	Terlaksananya Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun
																pengembangan infrastruktur	Terlaksananya pengembangan infrastruktur	Jumlah Infratstruktur Statistik
5.			Terwujudnya Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Nilai Indeks Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi	50%	55%	65%	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Persentase Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	100%	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Pemerintah Kabupaten yang Diamankan Melalui Penyelenggaraan Persandian	100%	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
																pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
																Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
												Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	41 OPD	Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi

Unit Kerja	:	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiaan
Jabatan	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiaan
Tugas	:	Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan Persandiaan
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan Persandiaan Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan Persandiaan Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan/pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan Persandiaan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA PERHITUNGAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dibagi Total seluruh kegiatan x 100%	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA)	DiskominfoSandi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Kegiatan yg dilaksanakan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan x Realisasi x 100%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yg dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan x 100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dan jenis Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dan Jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
														Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
											Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pengembanagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dibagi dengan jumlah Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan direncanakan x 100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun
											Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah x 100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
														Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan
														Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Kominfo yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
											Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah x 100%	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah dan jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
														Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah dan Jenis bahan logistik kantor yang disediakan jumlah dan jenis orang/kegiatan yang disediakan makan dan minum
														Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah dan Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
														Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
														Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Volume/Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi SKPD
											Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah x 100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos, Jumlah Pengiriman Paket
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	jumlah dan jenis Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor jumlah dan jenis Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

														Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah dan Penggandaan yang disediakan dibagi dengan Jumlah barang dan Penggandaan yang direncanakan x 100%	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah mobil jabatan yang dipelihara
													Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknoogi informasi	Indeks SPBE	Meningkatnya pemanfaatan IT pada penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Jumlah OPD yang Terhubung akses Internet oleh Kominfosandi dibagi Total Jumlah Keseluruhan OPD yang ada di Kabupaten Seruyan x 100%	Data Perangkat Daerah yang terhubung akses Internet	Bidang IKP	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	Jumlah Cakupan Wilayah layanan telekomunikasi (Telepon dan Internet) di Seluruh Desa/Kelurahan Kab.Seruyan di bagi Jumlah Luas wilayah keseluruhan x100%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik yang bermitra dengan Pemda dibagi Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik yang terdata di wilayah Kabupaten Seruyan x 100%	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik.	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
									Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dibagi Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kabupaten x 100%		Jumlah Surat Kabar Nasional	Jumlah Surat Kabar Nasional yang di akomodir dibagi jumlah total surat kabar x100%	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
												Jumlah Surat Kabar Lokal	Jumlah Surat Kabar Lokal di akomodir dibagi jumlah total surat kabar lokal x100%	Monitoring Informasi dan Penetapan agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
														pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
														penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
														Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
														Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
														Layanan Hubungan Media	jumlah layanan hubungan media
														kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Pemangku Kepentitngan Mitra Pemda
														penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang di tingkatkan Kapasitasnya
														Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan
														Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

			Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang terintegrasi dibagi jumlah seluruh layanan publik yang tersedia x 100%	Data layanan Publik yang telah terintegrasi	Bidang TI & E-Government	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Internet dibagi Jumlah Rumah Tangga	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Sub Domain yang Dikelola	Jumlah Domain yang dikelola di bagi Jumlah keseluruhan Domain yang telah di tetapkan pemerintah daerah	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kbuupaten/Kota	jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	
														pengembangan dan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
														Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
												Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pemerintah Daerah yang Dikelola Melalui E-Government dibagi Jumlah Data Pemerintah Daerah x 100%	penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan E-government dalam penyelenggaraan pemerintah
															sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
															pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
															penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
															Kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
															koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
															Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
															penyelenggaraan sistem penghubungan layanan pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
															pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City
															Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
			Terwujudnya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi	Nilai Indeks Data Statistik Sektoral yang disajikan	Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan dibagi jumlah data statistik sektoral X 100%	Laporan Data Sektoral Perangkat Daerah	Bidang Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang di laksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan statistik Sektoral x100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terselenggara	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dikelola dan telah dianalisis dibagi Jumlah Data Statistik Sektoral yang dikumpulkan x 100%	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	
											Buku Kabupaten Dalam Angka	ada/tidaknya buku kabupaten dalam angka			Peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu ststistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
															Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah Metadata Statistik yang Dihimpun

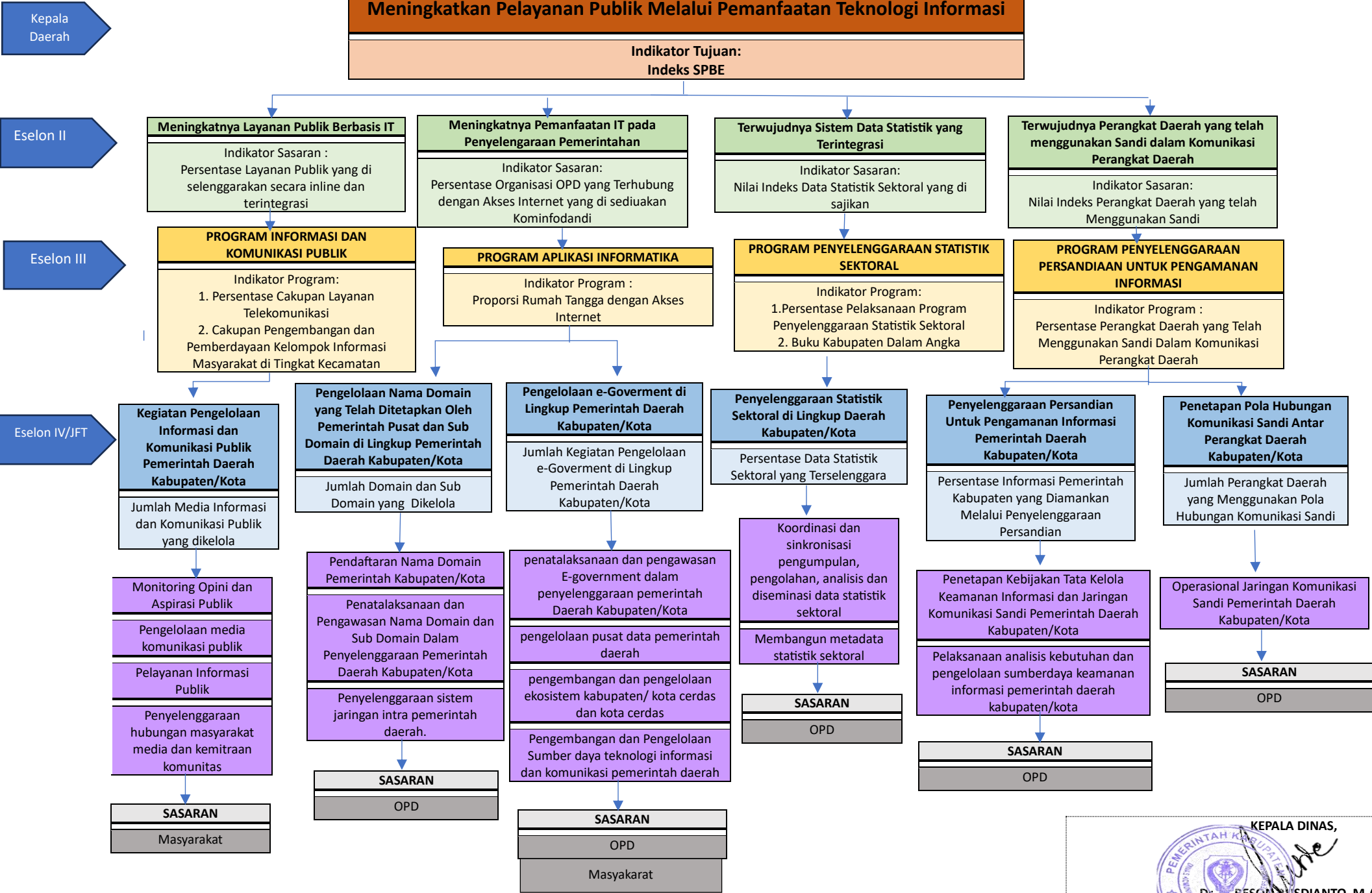
														pengembangan infrastruktur	Jumlah Infrastuktur Statistik
			Terwujudnya Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Nilai Indeks Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah dibagi Jumlah Total Perangkat Daerah x 100%	Data Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi	Bidang Persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah dibagi Jumlah Total Perangkat Daerah x 100%	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Pemerintah Kabupaten yang Diamankan Melalui Penyelenggaraan Persandian	Jumlah Informasi Pemerintah Kabupaten yang diamankan melalui persandian dibagi Jumlah Informasi yang perlu diamankan x 100%	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
														pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
														Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
											Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi dibagi jumlah seluruh perangkat Daerah	Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN



KEPALA DINAS,
Dr. H. RESONANSUDianto, M.A.P
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan sebagai dasar untuk melihat, mengukur, dan menilai tingkat kinerja suatu program dan kegiatan yang dijalankan/dilaksanakan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar pengukuran (keberhasilan/kegagalan) kinerja serta tingkat akuntabilitas masing-masing Instansi Pemerintah. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan/ kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan atau bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.